

Prakata



Kepala Badan
BP3AKKB Prov. Kalteng

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kami dapat menerbitkan Buku Profil Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tidak terpenuhinya hak anak akan menurunkan kualitas hidup anak dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Kami menyadari bahwa buku profil Anak ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan selanjutnya. Meskipun demikian melalui profil Anak ini kami berusaha untuk seoptimal mungkin dapat mempublikasikan, menyajikan data dan informasi mengenai profil anak BP3AKKB Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada semua pihak dan Tim penyusun yang telah memberikan masukan dalam proses penyempurnaan buku profil Anak ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Palangka Raya, Juli 2014

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

dr. Endang Kusriatun, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610705 198801 2 001

Pengarah

dr. Endang Kusriatun,MM

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kependudukan Dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah

Koordinator

Dra. Nur Sugiyati

Kepala Bidang Informasi Data
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kependudukan Dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah

Tim Penyusun

Bidang Informasi Data
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kependudukan Dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Husni Thamrin Nomor 11 Palangka Raya

Anggota

Herry Tuah,SE

(Kepala Sub Bidang Data Gender dan Anak)

Rusilawaty

(Kepala Sub Bidang Data Kependudukan dan KB)

Esterina,S.Kom

(Pelaksana Sub Bidang Data Gender dan Anak)

Sumarlin

(Pelaksana Sub Bidang Data Kependudukan dan KB)

Noni Elisserry

(Tenaga kontrak BP3AKKB)

Kata Pengantar

*P*uji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Buku Profil Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat disusun tepat pada waktunya. Pada buku ini akan diuraikan secara berturut-turut tentang latar belakang, maksud dan tujuan serta dasar hukum, sumber data dan sistematika penyajian profil Anak. Informasi yang disajikan adalah dalam bentuk tabulasi dan deskripsi agar lebih mudah dipahami. Sebagian besar data yang digunakan adalah data yang dihasilkan dari survei-survei yang dilaksanakan oleh Bidang Informasi BP3AKKB Provinsi Kalimantan Tengah. Disamping itu digunakan pula data dari instansi/SKPD terkait di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan penyediaan profil anak ini diharapkan dapat membantu penyediaan informasi bagi para stakeholders, akademisi, pebisnis, pelajar dan mahasiswa serta masyarakat umum berkaitan dengan perkembangan penduduk di Kalimantan Tengah. Selain itu dengan data dan informasi yang disajikan dalam profil ini diharapkan dapat tergalang permasalahan perkembangan penduduk yang diperlukan oleh para perumus kebijakan, pengambil keputusan dan perencana, terutama dalam mengintegrasikan aspirasi, kepentingan dalam proses pembangunan kependudukan di Kalimantan Tengah.

Demi penyempurnaan profil ini, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dan dengan selesainya penyusunan profil ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyediakan data profil kependudukan ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Palangka Raya, Juli 2014

Penyusun

Daftar Isi



PRAKATA KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sumber Data	2
D. Sistematika Penyajian Profil Anak	3
BAB II STRUKTUR PENDUDUK USIA 0 – 17 TAHUN	4
A. Jumlah dan Rasio Jenis kelamin	4
B. Potensi Daerah	5
BAB III KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	33
BAB IV PERLINDUNGAN KHUSUS	37
A. Upaya Perlindungan Anak	38
B. Perlindungan Khusus	38
C. Anak Bermasalah dengan Hukum	39
BAB V PENUTUP	44
LAMPIRAN	

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan visi dan misinya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah .serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 289 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan; fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal (1) Ayat (1) juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hasil proyeksi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini menunjukkan bahwa gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dimasa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara dimasa depan.

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi UU No.23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hasil pendidikan yang telah dicapai oleh masyarakat berguna untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dengan pemerataan pendidikan masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Dalam kaitan ini, pemerintah terus berupaya melaksanakan kebijakan pendidikan yang disebut “Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun”, untuk semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Dengan “wajar 9 tahun” berarti menunda anak-anak yang belum terampil tersebut untuk tidak segera mencari pekerjaan.

Agar ada kesamaan pandangan atau persepsi dalam menyusun buku profil anak yang sifatnya komprehensif, maka diperlukan panduan dan langkah-langkah untuk menyusun dan menganalisis data anak di setiap tingkatan pemerintah (kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional).

B. Tujuan

Tujuan penyusunan buku profil anak adalah sebagai pedoman, acuan, dan informasi yang akurat tentang kondisi anak-anak yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak cacat.



C. Sumber Data

Data yang diolah dan disajikan dalam Buku Profil Anak ini adalah data yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Data pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai pembanding digunakan data yang bersumber dari hasil pengolahan dari Badan/Dinas/Instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah..

D. Sistematika Penyajian Profil Anak

Adapun hal-hal yang disajikan dalam buku profil Anak tersusun dalam sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Struktur Penduduk Usia 0 – 17 Tahun
- Bab III : Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
- Bab IV : Perlindungan Khusus
- Bab V : Penutup



BAB II STRUKTUR PENDUDUK USIA 0 – 17 TAHUN

A. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin

Karakteritis usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak yang dimaksud dalam publikasi ini merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal (1) Ayat (1) yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumberdaya manusia, jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan membentuk anak tumbuh menjadi manusia berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga, masyarakat, maupun negara.

Salah satu ciri khas Kalimantan Tengah adalah hampir seluruhnya dialiri oleh sungai besar maupun kecil yang mengalir dari utara ke selatan dengan bermuara di Laut Jawa dengan sebelas sungai besar dan tidak kurang dari 33 sungai kecil atau anak sungai merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan untuk berbagai keperluan. dari hasil proyeksi penduduk 2013, penduduk laki-laki Kalimantan Tengah berjumlah 1.243,8 ribu jiwa (52,16 persen) dan penduduk perempuan berjumlah 1.140,9 ribu jiwa (47,84 persen). Kelompok penduduk terbesar di daerah ini terdapat pada penduduk usia produktif (25-44 tahun), khususnya penduduk produktif laki-laki. Hal ini salah satunya disebabkan adanya peningkatan jumlah

penduduk laki-laki yang umumnya datang dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai migran. Mereka biasanya merupakan tenaga kerja musiman atau perantaraan yang masih bujang (belum kawin) dan bekerja di perkebunan kelapa sawit dan karet, proyek-proyek bangunan dan lain sebagainya. Untuk sebagian dari mereka yang sudah berstatuskawin, mereka meninggalkan keluarga mereka yang masih bertempat tinggal atau menetap di provinsi sebelumnya. Persentase penduduk laki-laki dibandingkan perempuan terbesar di penduduk kelompok umur 55-59 tahun, sedangkan pada penduduk kelompok umur 70 tahun ke atas proporsi perempuan lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan angka harapan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

B. Potensi Daerah

Potensi Daerah dapat diartikan sebagai sumber daya tarik suatu daerah, baik yang berasal dari alam maupun buatan yang terkandung dalam suatu wilayah yang memiliki nilai bobot dan nilai guna lebih serta diperkirakan dapat menjadi komoditas unggulan daerah sehingga bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Potensi daerah yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah diharapkan dapat menciptakan peluang investasi yang menghasilkan komoditas unggulan daerah, sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun potensi daerah yang dimiliki yaitu sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dalam rangka optimalisasi dan menyatukan langkah pelaksanaan pendidikan bagi setiap stakeholders pendidikan, maka dikeluarkan Konsep Terobosan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dengan PROGRAM KALTENG HARATI (KALTENG CERDAS) agar pelaksanaan program pendidikan lebih terarah dan fokus pada kearifan dan budaya lokal. Dalam Tumbuh kembangnya, anak memiliki masa-masa emas atau yang sering disebut dengan golden age yaitu usia dini. Diusia tersebut, anak akan mudah

meniru apa yang disekitarnya. Oleh karenanya, anak harus mendapatkan pendidikan yang baik pada usia tersebut.

Pendidikan usia dini atau yang lebih sering dikenal dengan istilah PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani.

Adapun program tersebut dicanangkan pada setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2013 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi :

- a. Meningkatkan kesejahteraan para guru, berupa insentif, perumahan dan alat transportasi ;
- b. Memperbanyak pendidikan dan pelatihan secara meluas dan merata kepada para guru ;
- c. Memberikan bantuan dan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang berprestasi ;
- d. Menyediakan dan mendistribusikan buku-buku pelajaran secara adil, meluas dan merata ; dan
- e. Meningkatkan kualitas mutu belajar dan mengajar.

Dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi dan kewenangan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki kelemahan dan kekurangan, yaitu sangat sulit memperoleh data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang umumnya masih minim dan belum memadai, kekurangan guru atau tenaga pendidik di daerah-daerah pedalaman dan lain sebagainya. Hal ini terjadi disebabkan jarak yang masih relatif jauh antara daerah induk dengan daerah tujuan, sehingga perlu dilakukan penanganan dan dukungan semua unsur/elemen dengan melakukan :

- a. Memprioritaskan pemenuhan kualitas, kuantitas, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di semua kabupaten/kota, sampai ke desa-desa yang terpencil.
- b. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah perlu dukungan pemenuhan data yang baik dan lengkap dari kabupaten/kota, untuk peningkatan pembangunan di bidang pendidikan pada masa mendatang.

- c. Diharapkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan kewenangan segera di revisi, karena pemberlakuannya berdasarkan Tim Evaluasi tidak sama di masing-masing provinsi.
- d. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan bidang pendidikan dengan meningkatkan alokasi anggaran pada APBD dan APBN sejak tahun 2010 mencapai 20% seperti yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dibidang pendidikan juga tidak kalah pentingnya dimana pendidikan merupakan sarana untuk membentuk generasi yang berkualitas. Penyediaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah mutlak diperlukan disamping pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Dalam hal ini perlu menjadikan pendidikan anak sebagai investasi untuk hari depan anak dan orang tua.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan prima, sehingga bertujuan untuk terwujudnya mutu, relevansi dan daya saing dalam bidang pendidikan untuk membentuk insan Kalimantan Tengah yang cerdas, komprehensif, sejahtera dan bermartabat. Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dan terarah. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Melalui pendidikan, terutama pendidikan disekolah, seorang anak tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga menjadi pribadi yang matang secara kognitif, afektif, maupun motorik. Selanjutnya dalam UU No.23 Tahun 2002 pasal (49) juga disebutkan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan seluas-luasnya hingga menyebabkan mereka putus sekolah.



Tabel 2.1. Pendidikan

No	Kabupaten/Kota	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD / Sederajat	Tamat SD / Sederajat	SLTP / Sederajat	SLTA / Sederajat	Jlh
1	Kotawaringin Barat	35.420	22.358	80.893	38.721	49.771	227.163
2	Kotawaringin Timur	67.779	69.513	123.088	61.351	64.634	386.365
3	Kapuas	72.172	70.980	137.142	58.517	48.610	387.421
4	Barito Selatan	8.377	14.174	40.210	25.572	25.354	113.687
5	Barito Utara	21.620	25.996	40.970	26.351	25.646	140.583
6	Katingan	14.888	16.994	46.926	29.688	26.668	135.164
7	Seruyan	16.930	18.427	58.530	21.893	19.615	135.395
8	Sukamara	9.208	8.318	16.416	6.367	6.541	46.850
9	Lamandau	7.317	8.938	28.244	12.071	9.037	65.607
10	Gunung Mas	28.461	22.248	29.389	26.867	21.552	128.517
11	Pulang Pisau	8.819	12.375	47.423	25.528	21.607	115.752
12	Murung Raya	11.248	14.736	37.807	16.365	15.270	95.426
13	Barito Timur	17.012	15.441	27.740	20.286	20.713	101.192
14	Kota Palangka Raya	31.647	25.258	36.259	39.817	77.525	210.506

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Tidak / Belum Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Total	Tidak / Belum Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Total
Kalimantan Tengah								99,23
	11,59	83,98	4,43	100	11,65	92,94	77,92	



Rata-Rata Jarak Terdekat (KM) di Tempuh	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
	1,44	3,03	2,89	1,24	3,49	3,32	1,30	3,33	3,11
Jenjang Pendidikan	10,51	15	15,23	11,68	18,10	15,03	11,32	17,05	15,13
Anak Berumur 7-17 Tahun Nonton TV	98,81	99,69	99,24	92,83	89,43	91,18	94,81	92,91	93,89
Mendengar Radio	7,93	9,50	8,71	6,29	6,13	6,21	6,83	7,28	7,05
Membaca Buku Pelajaran	98,81	99,69	99,24	92,83	89,43	91,18	94,81	92,91	93,89
Mengakses Internet	43,19	32,11	37,85	4,68	7,62	6,07	17,74	16,12	16,97
Olah Raga	80	72,03	76,07	68,15	66,87	67,53	72,08	68,62	70,40
Kursus	2,40	3,99	3,18	0,49	0,91	0,69	1,12	1,96	1,53
Orang Pergi Ke Museum	1,30	0,39	0,85	0,48	0,92	0,69	0,75	0,74	0,74
Jumlah Anak Dididik (Narapidana)	60	4	64	32	-	32	92	4	96

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng

Pendidikan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh anak sehingga masih terdapat anak-anak yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab seseorang yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi (kemiskinan atau kemampuan ekonomi orang tua), faktor geografis (daerah perbukitan, wilayah pedalaman, dan kepulauan sehingga akses sekolah sulit dijangkau), dan faktor sosial budaya (motivasi anak rendah atau adanya anggapan bahwa perempuan sebaiknya tidak bersekolah terlalu tinggi).

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan menuju masyarakat dewasa dan mandiri, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Sejauh mana amanat yang tercermin dalam UUD 1945 dan GBHN, dimana dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah atau sedang dicapai oleh masyarakat merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Tidak terkecuali seorang anak, dimana hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam piagam PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yaitu merupakan pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Keseluruhan hak anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kluster yaitu :

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan



4. Pendidikan pemanfaatan waktu luang
5. Kegiatan budaya serta perlindungan khusus

Dari tabel terlihat bahwa secara umum APK SD baik laki-laki maupun perempuan pada seluruh kabupaten/kota di atas 100 persen kecuali Kabupaten Lamandau. Kondisi ini menunjukkan bahwa murid SD selain mencakup anak usia 7-12 tahun, juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan ada juga anak berusia lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terdapat anak yang tinggal kelas, terlambat masuk SD atau sebaliknya terlalu dini bersekolah di SD.

Tabel 2.2.
 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)
 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2011-2013

Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	103,94	111,91	107,47	101,66	100,59	104,48
Kotawaringin Timur	102,63	110,66	111,60	103,31	115,32	112,64
Kapuas	105,99	109,31	110,66	97,62	107,96	113,51
Barito Selatan	110,48	109,36	126,11	101,04	119,03	121,34
Barito Utara	107,13	105,56	113,30	114,85	105,40	103,11
Sukamara	95,77	105,28	105,48	112,18	99,90	105,94
Lamandau	107,53	105,80	108,30	122,24	103,28	99,33
Seruyan	109,82	115,27	111,55	103,96	109,22	107,89
Katingan	105,61	113,10	116,18	106,24	114,38	106,37
Pulang Pisau	105,82	103,03	105,74	110,76	104,08	104,40
Gunung Mas	106,26	117,99	103,95	104,86	111,09	116,41
Barito Timur	103,91	109,57	104,72	107,10	112,83	114,63
Murung Raya	112,46	105,49	118,73	110,69	114,38	119,23
Palangka Raya	97,72	106,10	110,12	106,59	101,19	109,66
Kalimantan Tengah	105,22	109,64	111,23	104,91	109,15	110,50

Sumber: BPS, Susenas 2011-2013



Kemudian jika kita bandingkan antara laki-laki dan perempuan terdapat pola yang berbeda antar kabupaten/kota. Pada tahun 2013, ada 8 kabupaten dengan nilai APK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan yaitu Kotawaringin Barat, Barito Selatan, Barito Utara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau, dan Palangka Raya. Sedangkan kabupaten/kota yang nilai APK perempuannya lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu Kotawaringin Timur, Kapuas, Sukamara, Gunung Mas, Barito Timur, dan Murung Raya. Namun secara umum APK SD Provinsi Kalimantan Tengah untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Tabel 2.3.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2011-2013

Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	80,43	81,35	101,61	89,64	80,12	89,36
Kotawaringin Timur	97,64	61,00	78,53	87,23	77,21	83,40
Kapuas	77,16	73,93	84,96	86,68	65,58	80,50
Barito Selatan	98,85	100,21	57,50	100,58	71,04	45,07
Barito Utara	83,59	78,43	64,03	73,22	89,62	91,98
Sukamara	99,91	97,36	68,72	79,47	60,69	75,29
Lamandau	100,42	87,79	75,42	84,37	100,96	72,61
Seruyan	65,51	70,57	71,94	93,31	75,88	69,41
Katingan	110,53	86,65	66,31	100,10	85,14	90,30
Pulang Pisau	85,62	90,61	102,69	85,69	68,83	85,22
Gunung Mas	97,67	75,38	77,59	89,77	96,16	102,96
Barito Timur	95,88	104,33	83,20	143,47	73,37	78,13
Murung Raya	68,97	77,28	73,19	93,32	99,67	86,64
Palangka Raya	101,92	92,96	92,21	95,09	84,50	79,08
Kalimantan Tengah	88,50	79,51	80,08	90,81	78,41	81,47

Sumber: BPS, Susenas 2011-2013

Hal yang berbeda untuk jenjang pendidikan SMP, dimana hampir semua kabupaten/kota angkanya cenderung di bawah 100 persen semua, kecuali Kabupaten Kotawaringin Barat, Pulang Pisau, dan Gunung Mas. Kemudian jika kita bandingkan antara laki-laki dan perempuan terdapat pola yang berbeda antar kabupaten/kota. Pada tahun 2013, ada 8 kabupaten dengan nilai APK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan yaitu Kotawaringin Barat, Kapuas, Barito Selatan, Lamandau, Seruyan, Pulang Pisau, Barito Timur, dan Palangka Raya. Sedangkan kabupaten/kota yang nilai APK perempuannya lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu Kotawaringin Timur, Barito Utara, Sukamara, Katingan, Gunung Mas, dan Murung Raya. Namun secara umum APK SMP Provinsi Kalimantan Tengah untuk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Tabel 2.4
 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2011-2013

Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	58,97	72,75	73,69	67,57	64,66	55,73
Kotawaringin Timur	42,06	64,77	71,38	49,54	49,65	63,16
Kapuas	54,72	42,21	31,65	56,07	49,98	46,63
Barito Selatan	73,62	43,56	60,06	78,16	61,61	49,72
Barito Utara	64,79	55,60	86,86	34,29	57,53	54,18
Sukamara	64,08	54,26	68,29	71,41	58,95	57,83
Lamandau	39,21	69,22	62,81	59,89	88,22	92,68
Seruyan	35,21	61,79	26,69	54,06	37,32	41,11
Katingan	65,52	72,62	63,51	58,81	54,18	58,17
Pulang Pisau	60,45	45,38	42,61	70,94	73,51	71,21
Gunung Mas	57,74	37,83	46,07	69,87	36,56	60,44
Barito Timur	58,13	59,92	60,21	50,87	88,36	65,56
Murung Raya	43,33	60,07	62,52	58,40	44,45	47,55
Palangka Raya	68,43	88,82	74,57	69,03	83,30	59,26
Kalimantan Tengah	54,76	59,98	58,60	59,45	58,04	56,66

Sumber: BPS, Susenas 2011-2013

Pada jenjang pendidikan SMA, nilai APK baik laki-laki maupun perempuan untuk semua kabupaten/kota di bawah 93 persen. Jika kita lihat dari jenjang pendidikan SD sampai SMA, terlihat kecenderungan semakin tinggi jenjang pendidikannya maka nilai APK juga semakin menurun.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama penduduk usia muda. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Dari tabel terlihat bahwa APS penduduk umur 7-12 tahun nilainya sudah hampir 100 persen semua, yang berarti hampir semua penduduk umur 7-12 tahun sedang bersekolah. Selama tahun 2011-2013 ini jika kita bandingkan dari jenis kelaminnya, nilai APS perempuan Provinsi Kalimantan Tengah selalu lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan sudah ada kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan umur 7-12 tahun untuk bersekolah. APS perempuan tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Lamandau, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, dan Palangka Raya yang mencapai 100 persen, sedangkan APS laki-laki tertinggi di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, dan Palangka Raya yang mencapai 100 persen.



Tabel 2.5.
 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 7-12 Tahun
 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2011-2013

Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	98,68	99,08	96,61	97,63	95,98	99,19
Kotawaringin Timur	99,42	99,10	98,12	97,63	98,86	100,00
Kapuas	95,24	96,73	98,01	98,22	98,63	99,02
Barito Selatan	98,18	97,61	100,00	100,00	98,45	100,00
Barito Utara	99,39	98,17	99,37	98,91	99,60	99,18
Sukamara	93,17	95,68	98,15	95,99	95,46	96,46
Lamandau	96,94	95,38	99,55	96,60	99,04	100,00
Seruyan	96,73	98,82	98,03	98,58	98,10	100,00
Katingan	99,54	100,00	99,03	98,54	100,00	100,00
Pulang Pisau	99,42	94,10	98,13	98,76	96,10	97,62
Gunung Mas	97,28	100,00	99,31	99,09	100,00	100,00
Barito Timur	98,90	98,66	100,00	99,18	98,81	98,00
Murung Raya	97,70	100,00	100,00	97,55	100,00	99,49
Palangka Raya	97,85	100,00	100,00	98,33	100,00	100,00
Kalimantan Tengah	97,94	98,39	98,61	98,28	98,63	99,43

Sumber: BPS, Susenas 2011-2013

Jika kita lihat nilai APS penduduk umur 13-15 tahun masih di bawah nilai APS penduduk umur 7-12 tahun yang hampir mencapai 100 persen semua. Rendahnya APS pada kelompok umur ini menjadi pekerjaan rumah bersama, mengingat program wajib belajar 9 tahun yang telah lama dicanangkan namun ternyata masih belum semua penduduk umur 7-15 tahun dapat mengenyam pendidikan. Tahun 2013 di Kalimantan Tengah APS penduduk perempuan umur 13-15 tahun juga lebih tinggi dibandingkan APS penduduk laki-laki. Jika kita bandingkan antar kabupaten/kota, APS laki-laki tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mencapai 98,87 persen, sedangkan APS perempuan tertinggi di Kota Palangka Raya sebesar 97,55 persen.



Tabel 2.6.
 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 13-15 Tahun
 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2011-2013

Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	86,65	94,09	98,87	92,78	85,30	96,45
Kotawaringin Timur	83,07	80,57	84,43	81,82	86,06	90,81
Kapuas	87,36	77,54	83,29	76,18	72,33	78,90
Barito Selatan	87,33	95,01	67,44	88,11	84,42	60,96
Barito Utara	81,54	76,08	78,23	76,37	85,36	89,72
Sukamara	81,85	87,36	80,03	91,70	74,63	90,21
Lamandau	92,22	100,00	91,67	97,57	96,89	94,38
Seruyan	75,78	87,45	63,90	84,80	81,80	68,98
Katingan	90,77	87,55	80,31	92,04	85,93	92,85
Pulang Pisau	86,44	85,47	87,16	89,90	84,01	84,97
Gunung Mas	85,42	82,75	73,13	91,81	88,57	96,22
Barito Timur	80,15	100,00	96,64	90,65	91,21	96,60
Murung Raya	78,37	90,81	96,35	86,97	92,67	95,86
Palangka Raya	88,48	97,13	93,26	92,09	92,45	97,55
Kalimantan Tengah	85,23	86,51	84,19	86,10	84,46	87,56

Sumber: BPS, Susenas 2011-2013



Tabel 2.7.
 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 16-18 Tahun
 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2011-2013

Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	42,36	72,97	74,62	57,97	59,48	62,35
Kotawaringin Timur	51,30	57,20	72,90	47,80	50,84	60,11
Kapuas	48,08	30,53	37,96	55,82	42,64	46,50
Barito Selatan	60,89	52,86	47,07	66,89	58,52	46,73
Barito Utara	62,95	53,69	65,33	36,34	78,71	52,00
Sukamara	60,29	61,22	61,65	63,05	33,14	45,43
Lamandau	43,03	68,07	68,09	58,27	72,16	44,27
Seruyan	39,47	45,98	58,87	61,95	35,06	43,19
Katingan	64,52	68,00	55,11	64,08	54,96	62,00
Pulang Pisau	49,24	48,30	55,16	58,76	53,16	45,21
Gunung Mas	54,07	38,84	45,59	51,22	41,51	68,92
Barito Timur	54,49	63,95	50,87	61,07	58,23	58,08
Murung Raya	40,21	47,99	56,01	52,26	52,14	45,32
Palangka Raya	69,04	70,10	81,84	64,80	70,83	66,64
Kalimantan Tengah	52,51	54,40	60,68	56,47	53,72	55,77

Sumber: BPS, Susenas 2011-2013

Dari ketiga tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi kelompok umur maka semakin kecil nilai APS nya. Hal ini terlihat pada kelompok umur 16-18 tahun dimana nilai APS hanya berkisar sekitar 70 persen saja. Berbeda dengan kelompok umur 7-12 dan 13-15 tahun, pada tahun 2013 APS penduduk laki-laki umur 16-18 tahun lebih tinggi dibandingkan APS perempuan. Kemudian jika kita lihat perbandingan antar kabupaten/kota, APS penduduk laki-laki umur 16-18 tahun tertinggi di Kota Palangka Raya

mencapai 81,84 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten Kapuas yang hanya sebesar 37,96 persen. APS penduduk perempuan umur 16-18 tahun tertinggi di Kabupaten Gunung Mas yang mencapai 68,92 persen dan terendah di Kabupaten Seruyan hanya sebesar 43,19 persen.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Jika seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Dibandingkan tahun lalu APM SD mengalami peningkatan, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti tahun-tahun sebelumnya APM perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. APM SD laki-laki tertinggi di Kabupaten Murung Raya yang mencapai 99,59 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Pulang Pisau yang hanya sebesar 93,09 persen. APM perempuan tertinggi di Kabupaten Gunung Mas yang mencapai 99,74 persen sedangkan terendah di Kabupaten Pulang Pisau yang hanya sebesar 89,80 persen.



Tabel 2.8.
 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD)
 Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin, 2011-2013

Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	95,85	99,09	94,24	91,94	94,10	98,16
Kotawaringin Timur	95,76	97,54	98,12	91,69	98,31	98,46
Kapuas	91,23	93,63	97,11	90,22	96,70	96,70
Barito Selatan	89,18	97,06	97,92	89,30	98,46	98,80
Barito Utara	93,01	95,10	99,14	97,31	96,47	97,33
Sukamara	87,20	90,62	97,00	92,54	92,46	96,10
Lamandau	90,89	94,55	99,55	94,10	91,84	94,36
Seruyan	95,58	98,66	97,31	96,73	95,19	97,14
Katingan	91,50	97,16	98,52	92,32	97,90	99,09
Pulang Pisau	91,41	87,36	93,09	93,87	93,00	89,80
Gunung Mas	90,85	100,00	97,09	92,42	98,90	99,74
Barito Timur	90,20	91,78	97,85	92,01	98,07	94,52
Murung Raya	95,38	97,97	99,59	92,56	97,51	99,49
Palangka Raya	85,38	94,68	96,50	89,44	91,63	99,40
Kalimantan Tengah	92,37	95,87	97,23	92,11	96,16	97,60

Sumber: BPS, Susenas 2011-2013

APM SMP lebih rendah dibandingkan APM SD. Pada jenjang ini APM perempuan juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki. APM laki-laki tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mencapai 99,09 persen dan terendah di Kabupaten Seruyan yang hanya sebesar 87,20 persen. Sedangkan APM perempuan tertinggi di Kabupaten Katingan yang mencapai 99,09 persen dan yang terendah di Kabupaten Barito Selatan sebesar 89,30 persen.



Tabel 2.9.
 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2011-2013

Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	70,53	67,98	76,40	72,55	63,48	71,54
Kotawaringin Timur	68,87	42,32	59,31	61,61	73,23	80,03
Kapuas	64,71	63,19	70,46	59,51	56,97	69,03
Barito Selatan	67,43	84,43	43,89	64,71	54,81	36,36
Barito Utara	63,04	63,39	61,85	53,63	68,42	75,44
Sukamara	69,17	75,17	55,38	66,20	49,68	65,72
Lamandau	65,83	75,91	66,85	69,15	67,55	55,19
Seruyan	52,40	64,85	42,14	73,58	56,05	50,88
Katingan	66,72	67,98	61,78	74,25	62,14	81,59
Pulang Pisau	63,32	71,94	74,52	69,79	60,68	73,72
Gunung Mas	68,80	69,95	67,60	73,12	77,93	79,78
Barito Timur	64,59	70,60	73,29	79,84	72,04	67,74
Murung Raya	54,64	67,45	70,04	71,30	80,05	81,03
Palangka Raya	67,91	76,53	76,24	74,19	60,54	77,45
Kalimantan Tengah	65,55	64,60	64,54	67,24	64,71	71,22

Sumber: BPS, Susenas 2011-2013

Dari tabel 4.7 – 4.9 terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah pula nilai APM nya. Pada jenjang SMA, APM laki-laki lebih tinggi dibandingkan APM perempuan. Kemudian jika dibandingkan antar kabupaten/kota terlihat bahwa APM laki-laki tertinggi di Kota Palangka Raya yang mencapai 52,87 persen dan terendah di Kabupaten Lamandau sebesar 28,30 persen. Sedangkan APM perempuan tertinggi di Kabupaten Barito Selatan yang mencapai 58,86 persen dan yang terendah di Kabupaten Barito Utara hanya sebesar 23,28 persen.



Tabel 2.10
 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA)
 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2011-2013

Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	37,72	53,28	55,40	54,27	48,39	47,51
Kotawaringin Timur	36,29	35,71	47,26	35,81	45,20	59,30
Kapuas	43,55	26,90	28,17	44,86	38,14	36,34
Barito Selatan	47,31	34,20	36,00	58,86	32,50	37,19
Barito Utara	50,09	43,12	60,16	23,28	46,52	38,68
Sukamara	48,98	52,86	51,99	56,76	28,43	36,70
Lamandau	28,30	57,62	45,33	45,37	57,85	40,26
Seruyan	32,07	39,78	20,20	40,16	25,89	27,57
Katingan	49,46	50,04	48,83	53,09	24,49	51,88
Pulang Pisau	42,75	38,53	38,52	51,99	49,63	40,57
Gunung Mas	45,02	33,12	43,84	51,21	30,90	53,31
Barito Timur	48,04	48,05	47,50	45,09	58,24	45,48
Murung Raya	35,58	40,26	53,06	41,26	39,44	35,96
Palangka Raya	52,87	58,02	60,99	52,03	61,00	44,80
Kalimantan Tengah	42,35	41,48	44,92	45,80	43,31	44,41

Sumber: BPS, Susenas 2011-2013

5. Angka Melek Huruf (AMH)

Membaca merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memajukan setiap individu, karena membaca adalah dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, indikator Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Salah satu keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan semakin berkurangnya tingkat buta huruf penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Kemampuan baca tulis merupakan

pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai hidup sejahtera. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah berusaha agar penduduk laki-laki maupun perempuan di segala lapisan masyarakat dapat terbebaskan dari buta aksara. Usaha pemerintah selama ini antara lain diwujudkan dengan program wajib belajar 9 tahun dan program kejar paket A dan B.

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya, dimana hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Kata melek huruf dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca. Angka Melek Huruf (AMH) adalah tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan.

Indikator AMH dapat digunakan untuk:

- mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD masih tinggi.
- menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.



Kebalikan dari AMH adalah Angka Buta Huruf (ABH) yang menunjukkan ketertinggalan sekelompok penduduk tertentu dalam mencapai pendidikan. Buta huruf dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan membaca dan menulis. Buta huruf sangat terkait dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan serta ketidakberdayaan masyarakat.



Tabel 2.11
 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kabupaten/Kota,
 Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2013

Kabupaten/Kota	15-19		20-24		25-29		30-34	
	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kotawaringin Barat	100,0	100,0	98,7	100,0	100,0	98,9	98,5	100,0
Kotawaringin Timur	100,0	100,0	99,4	100,0	100,0	97,3	100,0	99,5
Kapuas	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	98,2	100,0	98,6
Barito Selatan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Barito Utara	100,0	100,0	100,0	100,0	98,5	100,0	100,0	99,5
Sukamara	98,7	99,2	97,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Lamandau	100,0	100,0	100,0	100,0	97,8	100,0	100,0	100,0
Seruyan	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	98,2	97,8	100,0
Katingan	100,0	98,4	100,0	100,0	97,0	99,6	100,0	100,0
Pulang Pisau	98,5	98,2	100,0	99,4	99,0	100,0	100,0	100,0
Gunung Mas	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Barito Timur	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6	100,0	100,0	99,1
Murung Raya	100,0	100,0	100,0	100,0	98,7	98,3	98,0	98,9
Palangka Raya	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kalimantan Tengah	99,9	99,8	99,7	100,0	99,5	98,9	99,6	99,6

Sumber: BPS, Susenas 2013



Lanjutan Tabel 2.11

Kabupaten/Kota	35-39		40-44		45-49	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kotawaringin Barat	100,0	99,4	98,9	95,8	94,6	84,4
Kotawaringin Timur	100,0	100,0	98,6	95,3	96,2	95,4
Kapuas	100,0	98,0	96,7	96,9	93,4	99,1
Barito Selatan	98,8	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Barito Utara	100,0	98,6	100,0	94,3	97,1	91,5
Sukamara	100,0	97,4	99,1	94,8	98,9	91,4
Lamandau	100,0	100,0	98,2	95,2	100,0	95,5
Seruyan	100,0	93,5	98,0	99,1	95,9	90,6
Katingan	100,0	100,0	99,2	98,3	100,0	100,0
Pulang Pisau	100,0	100,0	97,0	100,0	97,7	100,0
Gunung Mas	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Barito Timur	100,0	97,7	100,0	100,0	99,1	95,7
Murung Raya	100,0	100,0	98,7	100,0	93,0	100,0
Palangka Raya	98,3	100,0	100,0	98,5	100,0	100,0
Kalimantan Tengah	99,7	98,9	98,7	97,4	96,9	95,9

Sumber: BPS, Susenas 2013



Lanjutan Tabel 2.11

Kabupaten/Kota	50-54		55-59		60+	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Kotawaringin Barat	90,1	73,9	100,0	64,5	95,1	67,9
Kotawaringin Timur	100,0	91,8	100,0	90,7	96,3	75,1
Kapuas	98,8	94,6	96,9	84,9	93,0	76,1
Barito Selatan	100,0	97,9	99,1	100,0	100,0	88,3
Barito Utara	93,1	95,0	95,2	96,3	92,2	86,7
Sukamara	87,5	97,3	100,0	63,6	93,6	57,6
Lamandau	100,0	93,9	100,0	95,6	98,3	92,8
Seruyan	97,6	98,2	95,8	72,8	83,5	74,6
Katingan	100,0	100,0	100,0	100,0	98,4	92,9
Pulang Pisau	100,0	98,1	99,1	100,0	96,8	89,6
Gunung Mas	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,1
Barito Timur	92,7	95,3	100,0	98,5	96,5	77,9
Murung Raya	100,0	93,0	98,8	74,9	94,6	85,7
Palangka Raya	100,0	94,8	95,8	95,4	98,8	93,7
Kalimantan Tengah	97,7	92,7	98,4	90,3	95,6	81,5

Sumber: BPS, Susenas 2013

Jika dilihat menurut kelompok umur, persentase penduduk melek huruf pada umur tua lebih rendah dibandingkan umur muda. Perbedaan angka melek huruf antara penduduk laki-laki dan perempuan pada semua kelompok umur tampaknya tidak terlalu mencolok. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan saat ini semakin mengecil.

6. Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Daya saing suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas SDM nya yang merupakan modal dasar pembangunan bangsa.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas SDM, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka seseorang akan dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, maka tamatan pendidikan tinggi diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya, peningkatan produktivitas seseorang dalam bekerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kemajuan yang dicapai oleh suatu bangsa antara lain sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya.

Tabel 2.12.
 Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas
 Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan
 Jenis Kelamin, 2011-2013

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki			Perempuan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD ke bawah	66,28	54,28	53,67	60,46	55,93	60,08
SMP	19,22	19,80	19,72	18,82	18,36	18,08
SMA	19,02	19,91	20,79	15,05	16,26	16,10
D1/D2/D3	1,84	1,36	1,45	2,43	1,97	2,10
D4/S1/S2/S3	3,64	4,65	4,38	3,23	3,88	3,65

Sumber: BPS, Susenas 2011-2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase penduduk yang berpendidikan SMP ke bawah terus mengalami penurunan, sehingga diharapkan kualitas SDM juga semakin meningkat. Kemudian jika kita bandingkan persentase penduduk yang berpendidikan SD ke bawah lebih tinggi perempuan dibandingkan laki-laki, sedangkan persentase penduduk yang berpendidikan SMP ke atas lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan.

Tabel 2.13.
 Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas
 Menurut Kabupaten/Kota, Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, dan
 Jenis Kelamin, 2013

Kabupaten/Kota	SD ke bawah		SMP		SMA	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	51,40	58,74	20,20	20,15	23,09	16,56
Kotawaringin Timur	56,73	64,99	19,40	15,09	19,17	15,84
Kapuas	65,36	69,04	16,87	17,30	14,84	10,76
Barito Selatan	57,59	58,60	19,52	20,38	17,85	16,33
Barito Utara	52,58	60,51	19,61	18,15	20,79	13,47
Sukamara	56,82	67,81	16,62	14,42	20,55	12,84
Lamandau	59,57	63,34	17,70	20,13	17,17	12,20
Seruyan	62,98	72,90	19,53	14,54	15,23	8,20
Katingan	49,15	58,12	27,74	23,05	18,83	13,91
Pulang Pisau	56,91	63,42	20,35	16,56	15,70	12,26
Gunung Mas	48,55	52,27	24,96	26,54	21,45	13,87
Barito Timur	47,05	54,39	21,61	19,04	26,11	18,97
Murung Raya	64,48	71,02	15,52	16,23	15,43	8,76
Palangka Raya	27,13	33,16	18,40	17,48	38,61	36,33
Kalimantan Tengah	53,67	60,08	19,72	18,08	20,79	16,10

Sumber: BPS, Susenas 2013

Lanjutan Tabel 2.13

Kabupaten/Kota	D1/D2/D3		D4/S1/S2/S3	
	L	P	L	P
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kotawaringin Barat	1,41	2,01	3,90	2,54
Kotawaringin Timur	1,41	1,50	3,29	2,57
Kapuas	0,29	0,72	2,64	2,18
Barito Selatan	1,95	2,15	3,09	2,53
Barito Utara	0,88	3,95	6,15	3,92
Sukamara	3,36	2,08	2,65	2,85
Lamandau	2,59	1,60	2,97	2,73
Seruyan	0,90	1,34	1,35	3,01
Katingan	1,49	2,13	2,80	2,80
Pulang Pisau	1,88	2,61	5,17	5,15
Gunung Mas	1,93	2,64	3,12	4,68
Barito Timur	2,02	2,41	3,21	5,19
Murung Raya	0,14	0,64	4,43	3,34
Palangka Raya	2,61	4,54	13,25	8,49
Kalimantan Tengah	1,45	2,10	4,38	3,65

Sumber: BPS, Susenas 2013

7. Rata-rata Lama Sekolah

Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki mencapai 8,46 tahun, artinya rata-rata tingkat pendidikan penduduk laki-laki adalah kelas 3 SMP.

Tabel 2.14.
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2011-2013

Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	7,94	8,43	8,40	7,20	7,45	7,53
Kotawaringin Timur	7,89	8,08	8,11	7,24	7,39	7,39
Kapuas	7,47	7,43	7,37	6,89	6,98	6,83
Barito Selatan	8,28	8,39	8,30	7,77	8,06	7,95
Barito Utara	8,39	8,39	8,49	7,40	7,58	7,83
Sukamara	7,51	7,91	8,13	6,74	6,97	7,01
Lamandau	7,98	8,16	8,11	7,39	7,44	7,54
Seruyan	7,41	7,63	7,66	6,83	6,47	6,90
Katingan	8,50	8,36	8,66	8,08	7,97	8,21
Pulang Pisau	7,91	7,73	8,17	7,29	7,34	7,67
Gunung Mas	8,72	8,58	9,02	8,49	8,46	8,58
Barito Timur	8,84	9,14	8,72	8,33	8,52	8,27
Murung Raya	7,45	7,93	7,70	7,12	7,07	7,11
Palangka Raya	10,61	11,31	11,18	10,36	11,08	10,60
Kalimantan Tengah	8,22	8,43	8,46	7,68	7,85	7,85

Sumber: BPS, Susenas 2011-2013

Jika kita bandingkan antar kabupaten/kota, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki tertinggi di Kota Palangka Raya yang mencapai 11,18 tahun dan terendah di Kabupaten Kapuas yang hanya sebesar 7,37 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan tertinggi juga di Kota Palangka Raya yang mencapai 10,60 tahun dan yang terendah di Kabupaten Kapuas hanya sebesar 6,83 tahun. Terlihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan tertinggi di Kota Palangka Raya, hal ini wajar mengingat posisinya sebagai ibukota provinsi dan pendidikan yang terpusat di sini.

Tabel 2.15.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan SD,SLTP dan SLTA

No	Kab/Kota/kec	SD(L/P)	SMP(L/P)	SLTA (L/P)
1	Palangka Raya	0	8609	0
2	Katingan	0	6970	0
3	Gunung Mas	0	5160	0
4	Kotawaringin Timur	0	13547	0
5	Seruyan	0	6126	0
6	Kotawaringin Barat	0	8910	0
7	Lamandau	0	3148	0
8	Sukamara	0	1832	0
9	Pulang Pisau	0	4800	0
10	Kapuas	0	9374	0
11	Barito Selatan	0	5037	0
12	Barito Timur	0	4075	0
13	Barito Utara	0	5574	0
14	Murung Raya	0	4635	0

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng

Tabel 2.16.
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Menurut Kelompok Umur (7-18 Tahun)

No	Kab/Kota/kec	7 -12	13 - 15	16 - 18
1	Palangka Raya	0	9080	0
2	Katingan	0	6031	0
3	Gunung Mas	0	4364	0
4	Kotawaringin Timur	0	13252	0
5	Seruyan	0	4875	0
6	Kotawaringin Barat	0	8400	0
7	Lamandau	0	3162	0
8	Sukamara	0	1821	0
9	Pulang Pisau	0	4999	0
10	Kapuas	0	11756	0
11	Barito Selatan	0	5454	0
12	Barito Timur	0	4487	0
13	Barito Utara	0	5245	0
14	Murung Raya	0	4103	0

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng

Tabel 2.17.
 Angka Partisipasi Murni (APM)
 Menurut Jenjang Pendidikan SD,SLTP dan SLTA

No	Kab/Kota/Kec	SD (L/P)	SMP (L/P)	SLTA (L/P)
1	Palangka Raya	0	7.201	0
2	Katingan	0	5.556	0
3	Gunung Mas	0	2.719	0
4	Kotawaringin Timur	0	11.284	0
5	Seruyan	0	4.735	0
6	Kotawaringin Barat	0	7.071	0
7	Lamandau	0	2.719	0
8	Sukamara	0	1.491	0
9	Pulang Pisau	0	4.043	0
10	Kapuas	0	8.121	0
11	Barito Selatan	0	4.299	0
12	Barito Timur	0	3.623	0
13	Barito Utara	0	4.567	0
14	Murung Raya	0	3.717	0

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng



BAB III KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Menuju masyarakat yang sejahtera salah satu aspek yang perlu untuk diperhatikan dengan seksama adalah aspek kesehatan. Kesehatan menjadi modal utama dalam penyelenggaraan pencapaian tujuan maupun program-program suatu daerah. Hal ini berkaitan erat dengan terobosan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah untuk mencapai tujuan menjadikan masyarakat Kalimantan Tengah yang sehat yang dimanifestasikan ke dalam Program Pembangunan Kesehatan yang dinamai sebagai “KALTENG BARIGAS” (KALTENG SEHAT). Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam bidang kesehatan akan lebih menitikberatkan kepada aksestabilitas dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di tingkat Puskesmas dan jaringannya (Pustu, Polindes, Poskesdes) maupun rumah sakit.

Bertepatan dengan hari jadi ke-56 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tanggal 23 Mei 2013, Gubernur Kalimantan Tengah meluncurkan Kartu Kalteng Barigas (KKB) dalam rangkaian acara puncak peringatan HUT Provinsi Kalteng ke-56. KKB merupakan Sistem Jaminan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai implementasi dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Kesejahteraan merupakan hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat dan tenteram. Kesejahteraan meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan adalah status kesehatan masyarakat. Semakin baik kesehatan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahtraannya.

Tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesehatannya. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan adalah angka kesakitan atau sering disebut juga dengan angka

morbiditas. Keluhan kesehatan didefinisikan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa.

Kesehatan merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua/keluarga. Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan sehat baik fisik,mental,spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan anak juga menjadi perhatian dunia yang ditunjukkan dalam target yang ditetapkan pada dokumen Pembangunan Milenium (MDGs) tahun 2000 antara lain ; (a). menurunkan angka kematian anak;(b). meningkatkan derajat kesehatan ibu; (c) menekan angka penularan HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.Target pembangunan millenium lainnya secara tidak langsung sebenarnya juga mempengaruhi kesehatan anak. Target tersebut harus diupayakan tercapai pada tahun 2015. Pertemuan Internasional lainnya yang sejalan dengan MDG's, diantaranya adalah deklarasi tentang A Worlg Fit Children (WFC) yang “Mencanangkan Kehidupan yang sehat”. Keinginan terwujudnya dunia layak bagi anak ini dikonkritkan dalam pengembangan kabupaten/kota layak anak yang nantinya diharapkan menjadikan Indonesia layak anak.

Tabel 3.1.
Jumlah Anak yang Terinfeksi HIV/AIDS menurut Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota/Kec	1 – 18 Tahun	
		(L/P)	(L/P)
1	Palangka Raya		
2	Katingan		
3	Gunung Mas		
4	Kotawaringin Timur		
5	Seruyan		
6	Kotawaringin Barat		
7	Lamandau		
8	Sukamara		
9	Pulang Pisau	1	
10	Kapuas		
11	Barito Selatan		1
12	Barito Timur		
13	Barito Utara		
14	Murung Raya		

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng



Tabel 3.2.
Jumlah Anak Terlantar menurut Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota/Kec	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Palangka Raya	17	18
2	Katingan	0	0
3	Gunung Mas	38	39
4	Kotawaringin Timur	14	26
5	Seruyan	0	0
6	Kotawaringin Barat	19	26
7	Lamandau	17	18
8	Sukamara	0	0
9	Pulang Pisau	0	0
10	Kapuas	16	9
11	Barito Selatan	0	0
12	Barito Timur	18	13
13	Barito Utara	35	25
14	Murung Raya	0	0

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalteng

Tabel 3.3.
Jumlah Anak yang ditampung di Panti Asuhan
Menurut Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota/Kec	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Palangka Raya	277	290
2	Katingan	138	115
3	Gunung Mas	0	0
4	Kotawaringin Timur	130	129
5	Seruyan	57	59
6	Kotawaringin Barat	38	47
7	Lamandau	0	0
8	Sukamara	0	0
9	Pulang Pisau	0	0
10	Kapuas	165	167
11	Barito Selatan	64	68
12	Barito Timur	14	19
13	Barito Utara	14	175
14	Murung Raya	13	17

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalteng

Kesehatan adalah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yang tercermin dari kondisi fisik yang senantiasa sehat. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai langkah telah diupayakan oleh pemerintah salah satunya melalui pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, leluasa perkembangan dari AHH di Kalimantan Tengah

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Dengan kondisi fisik yang sehat maka manusia dapat melakukan aktivitas secara optimal. Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi salah satu fokus utama pembangunan manusia. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Dengan masyarakat yang memiliki tingkat derajat kesehatan tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Usaha yang sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan polindes. Oleh karena itu pembangunan di bidang kesehatan yang sedang digiatkan ini diharapkan dapat berakselerasi secara positif.

Upaya kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah sejauh ini telah diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yang makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu dalam penanganan faktor-faktor tersebut harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.



BAB IV PERLINDUNGAN KHUSUS

A. Upaya Perlindungan Anak

Upaya penanganan perlindungan anak secara nasional pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1990. Pada tahun tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi Tentang Hak-hak Anak (Convention on The Rights of The Child) melalui Keppres No.36/1990. Setelah Keppres tersebut diterbitkan, pemerintah mulai menyusun berbagai upaya untuk memetakan berbagai persoalan anak, baik dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun bekerjasama dengan Lembaga PBB yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak. Pada tahun 1997, pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak berupa Undang-undang Khusus yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang tersebut memberikan perhatian dan spesifikasi khusus bagi anak-anak yang disangka melakukan tindak pidana. Undang-undang ini juga memberikan kekhususan baik dalam penyidikan, penahanan, penuntutan, peradilan hingga penetapannya di lembaga pemasyarakatan anak.

Sebagai puncak dari upaya legislasi ini adalah lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan anak. Undang-undang no.23 Tahun 2002 secara khusus memberikan mandat untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebagai institut independen, KPAI diberikan mandat untuk melakukan pengawasan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh institut negara dan melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara.

Terkait dengan penerapan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, hingga saat ini masih banyak ditemukan anak-anak

yang harus menjalani hukuman penjara. Padahal sebagian besar dari mereka melakukan kejahatan ringan. Bagi sebagian pakar hukum dan masyarakat awam, batasan usia 8 tahun sebagai batas usia tanggung jawab kriminal bagi anak-anak dianggap terlalu rendah. Komitmen terhadap upaya perlindungan anak yang masih rendah juga nampak dari masih sering terjadinya kasus anak-anak pelaku kriminalitas yang tahan atau dimasukkan penjara bersama-sama atau dicampur dengan orang dewasa yang dapat memperparah/memperburuk perilaku dan kejiwaan anak kearah yang tidak baik.

B. Perlindungan Khusus

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak secara keseluruhan mencakup perlindungan khusus. Perlindungan anak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak merupakan upaya perlindungan yang diberikan untuk semua anak tanpa kecuali. Perlindungan khusus tersebut antara lain diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang bermasalah hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak korban tindak pidana, anak penyandang cacat dan anak terlantar.

Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 secara rinci menyebutkan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada :

1. Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata).
2. Anak berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual
5. Anak diperdagangkan
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan napza
7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
8. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental
9. Anak korban perlakuan salah/penelantaran
10. Anak penyandang cacat



Ulasan pada bagian ini difokuskan untuk melihat gambaran secara rinci mengenai kondisi dan perkembangan anak-anak yang mengalami situasi dan kondisi tertentu atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus selama periode lima tahun terakhir, Pada bagian ini juga akan dibahas mengenai jenis dan efektifitas perlindungan khusus yang diberikan pada mereka. Terkait dengan masalah keterbatasan data, cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus bermasalah dalam kajian ini hanya dibatasi pada anak bermasalah hukum, pekerja anak, dan anak penyandang cacat.

C. Anak Bermasalah dengan hukum

Anak bermasalah hukum yang dimaksud dalam kajian ini merujuk pada konsep “ anak yang berhadapan dengan hukum “ yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada pasal (64) ayat (1) disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dan anak korban tindak pidana. Sesuai dengan delik hukum, konflik hukum yang dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa, pada umumnya merupakan konsekuensi dari tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Atas perbuatan tersebut, pelakunya dapat diancam dengan sanksi atau hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana tindakan atau perbuatan melanggar hukum tersebut dikategorikan sebagai tindakan pidana, sedangkan sanksi hukumannya disebut sebagai pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tersebut sebagai anak nakal. Sedangkan yang dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang telah mencapai umur 8 (delapan) tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Klasifikasi serupa juga digunakan oleh kepolisian Republik Indonesia dan Lembaga Masyarakat untuk menentukan kriteria anak pelaku tidak pidana dan narapidana anak.



Sejalan dengan itu, analisis mengenai profil dan perkembangan anak bermasalah hukum pada bagian ini dilakukan dengan menggunakan data narapidana anak atau anak pidana hasil registrasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan analisis mengenai profil dan perkembangan anak korban tindak pidana dilakukan dengan menggunakan data anak korban tindak kejahatan/kriminalitas berdasarkan hasil registrasi Unit Pelayanan Anak Polresta Palangka Raya dengan Bidang PKHP BP3AKKB Provinsi Kalimantan Tengah

Dilihat dari proses penyelesaian hukumnya, anak nakal atau anak pelaku tindak pidana mencakup dua kriteria anak, yaitu anak didik pemasyarakatan (anak pidana) dan tahanan anak. Sebagaimana disebutkan pada pasal 1(ketentuan Umum) Butir 8 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan Putusan Pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan Putusan Pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak Sipil yaitu anak atas permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun.



Tabel 4.1.
Data Anak Pelaku Tindak Pidana

No	Jenis Tindak Pidana	P.Raya	Kapuas	Barsel	Barut	Bartim	Kobar	Kotim	Seruyan	Gumas	Pulpis	Lamandau	Mura
1	Pencurian	-	-	2	1	-	1	-	-	2	1	-	-
2	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Asusila												
	Pencabulan	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	Perkosaan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Pelecehan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Melarikan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Menyetubuhi Anak	12	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
4	Narkoba/Psikotropika	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Aniaya-Luka/Mati	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-
6	Penipuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Penggelapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Peras/Curas/Rampok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengeroyokan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Judi	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-
11	Trafiking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengrusakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemalsuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perzinahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Curat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Curanmor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	13	-	1	1	3	6	-	5	3	2	3	-

Sumber : Lapas klas II A Palangka Raya

Tabel 4.2.
Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Lapas dan Jenjang Pendidikan

No	Jenis Lapas	Pendidikan				Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	PT	
1.	Umum (laki-laki)	151	166	139	42	498
2.	Anak	5	5	-	-	10
3.	Wanita	6	9	21	2	38
Total		162	180	21	2	546

Sumber : Lapas klas II A Palangka Raya

Tabel 4.3.
Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur Pendidikan

No	Jenis Lapas	Kelompok Umur (tahun)					
		< 12	13-17	18-22	31-35	40-50	> 50
1.	Umum (laki-laki)	151	166	139	42	498	498
2.	Anak	5	5	-	-	10	10
3.	Wanita	6	9	21	2	38	38
Total		162	180	21	2	546	546

Sumber : Lapas klas II A Palangka Raya

Tabel 4.4.
Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Lapas dan Kasus

No	Lapas	Kasus							
		Pembunuhan	Pencurian	Pemeriksaan	Asusila	NAPZA	KDRT	Korupsi	Lainnya
1.	Umum (laki-laki)	86	11	69	2	265	8	18	39
2.	Anak	-	1	6	-	-	-	-	3
3.	Wanita	1	-	-	-	36	-	-	1

Sumber : Lapas klas II A Palangka Raya

Persentase Wanita 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012

KABUPATEN/KOTA	UMUR PERKAWINAN PERTAMA				
	≤ 15 tahun	16 tahun	17-18 tahun	19-24 tahun	≥ 25 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kotawaringin Barat	12,56	9,35	28,38	42,77	6,95
Kotawaringin Timur	9,48	9,62	32,59	40,97	7,34
Kapuas	12,01	10,19	23,67	44,56	9,57
Barito Selatan	12,73	9,44	21,24	43,78	12,82
Barito Utara	9,69	13,08	29,72	39,27	8,25
Sukamara	11,96	14,66	28,84	37,41	7,12
Lamandau	15,59	12,00	25,08	38,52	8,81
Seruyan	12,03	9,17	27,78	42,62	8,41
Katingan	8,89	8,03	28,80	44,96	9,31
Pulang Pisau	11,06	6,83	25,87	46,34	9,90
Gunung Mas	5,37	9,89	26,83	47,45	10,47
Barito Timur	13,34	6,71	25,07	43,40	11,48
Murung Raya	8,84	11,73	27,45	44,42	7,56
Palangka Raya	7,60	3,29	17,27	52,88	18,96
Kalimantan Tengah	10,65	9,09	26,49	43,94	9,82

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Kalimantan Tengah 2012



Sumber : Data BPS yang diolah.

BAB V Penutup

Penyusunan Profil Anak Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menggambarkan masalah secara fisiologis maupun psikologis yang dihadapi oleh anak-anak lebih rentan daripada orang dewasa karena perkembangan kompleks yang terjadi disetiap tahap perkembangan. Perlu upaya yang lebih serius dalam melaksanakan program perlindungan terhadap hak-hak anak. Seluruh penduduk negeri ini bersama organisasi kemasyarakatan yang ada harus digugah kesadarannya untuk ikut berpartisipasi secara aktif guna menyukseskan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan bangsa. Caranya tidak lain dengan ikut berpartisipasi menyukseskan program KB dalam pengertian luas yang saat ini telah menyentuh lima aspek garapan, yakni Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Kependudukan. Selain itu juga, perlu dilakukan sosialisasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan yang diharapkan dapat meningkatkan pendidikan dan pemahaman masyarakat terutama tentang KB, usia kawin pertama dan memperketat usia kawin pertama.

Profil ini disusun berdasarkan data hasil dari Dinas, Badan, Instansi yang terkait serta dilengkapi dengan sumber-sumber data lain. Kemudian disusun dan dianalisis secara deskriptif. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa pedoman penyusunan Buku Profil Anak ini merupakan pedoman yang ditujukan bagi daerah sebagai acuan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Buku Profil Anak ini masih banyak kekurangan baik dari segi data maupun analisisnya, oleh karena itu perlu masukan dari berbagai pihak, utamanya adalah para praktisi di tingkat lapangan sehingga pada akhirnya akan bermanfaat untuk kesempurnaan di masa akan datang, yang selanjutnya dapat meningkatkan akurasi data dalam menentukan formulasi kebijakan yang berguna bagi masyarakat.